**AGENDA SETTING KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DESTINASI DESA BATU
BETUMPANG
(STUDI TERHADAP PEMBANGUNAN DESA BATU BETUMPANG SEBAGAI
WISATA BARU DI BANGKA SELATAN)**

Robby

Universita Bangka Belitung

Email: robbyokey60@gmail.com

Abstrak

Studi dalam penelitian ini membahas mengenai pembangunan Desa Batu Betumpang sebagai wisata baru di Bangka Selatan. Di lingkungan Pulau Besar di Desa Batu Betumpang Kecamatan Pulau Besar Kabupaten Bangka Selatan juga terdapat banyak potensi desa wisata yang belum begitu dikembangkan secara optimal. Sejauh ini sudah banyak destinasi wisata alamiah yang masih mengandalkan daya Tarik alami pantainya, namun sudah bisa mengundang banyak wisatawan untuk datang. Tujuan dari penelitian ini pada dasarnya ingin menggali secara mendalam terkait bagaimana sebenarnya *agenda setting*, khususnya dilihat dari bagaimana desain kebijakan perencanaan dan pengembangan desa wisata Pantai di Desa Batu Betumpang. Sedangkan teknik pengumpulan data alam penelitian ini, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Studi ini juga akan melakukan telaah mengenai bagaimana hambatan dan tantangan yang dihadapi pihak pemerintah, baik dalam hal ini pihak pemerintah Desa maupun pihak Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori agenda setting oleh Anderson. Adapun metode yang di gunakan yaitu kualitatif deskriptif. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu bisa melihat proses pengembangan pantai Desa Batu Betumpang dengan menggunakan teori agenda setting dengan cara kebijakan pengembangan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Desa Batu Petumpang yang salah satunya pengambilan kebijakan untuk pembangunan gazebo dan lain-lain. Dalam hal ini pengembangan pantai Desa Batu Betumpang dapat kita ketahui yang menjadi tantangan dan hambatan dalam pengembangan pantai Desa Batu Betumpang yaitu perbedaan pendapat, kesadaran masyarakat dan kesadaran pengelola yang kurangnya komunikasi antar pengelola. Ini menjadi salah satu bentuk agenda setting yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah.

Kata Kunci: Agenda setting, Pengembangan, Desa wisata

Abstract

This study discusses the development of Batu Betumpang Village as a new tourism destination in South Bangka. In the area of Batu Betumpang Village, Pulau Besar District, South Bangka Regency, there are many potential tourist villages that have not been optimally developed. So far, there have been many natural tourist destinations that still rely on the natural attractiveness of their beaches, but have been able to invite many tourists to come. The purpose of this research is basically to dig in depth about how the actual agenda setting is, especially in terms of how the policy design for planning and developing a coastal tourism village in Batu Betumpang Village is. While the natural data collection techniques of this research are interviews, observation and documentation. This study will also examine the obstacles and challenges faced by the government, both the Village government and the South Bangka Regency Government. The theory used in this study is the agenda setting theory by Anderson. The method used is descriptive qualitative. While the data collection techniques in this research, namely interviews, observation, and documentation. The results of this study are being able to see the beach development process in Batu Betumpang Village by using agenda setting theory by means of development policies that have been carried out by the Batu Petumpang Village government, one of which is policy making for the construction of gazebos and others. In this case, the development of the beach in Batu Betumpang Village can be seen as the challenges and obstacles in developing the beach in Batu Betumpang Village, namely differences of opinion, community awareness and awareness of managers who lack communication between managers. This is a form of agenda setting carried out by the community and the government.

Keywords: Agenda setting, Development, Tourism village

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan segala kegiatan dalam masyarakat yang berhubungan dengan berbagai kegiatan perjalanan dan pelayanan jasa bagi para wisatawan (Soekadijo, 2001; Oka, 2001). Pariwisata Indonesia telah menjadi bentuk industri yang menyumbang devisa terbesar kedua di Indonesia, karena Indonesia merupakan negara dengan berbagai jenis pariwisata baik dari segi budaya, sosial maupun wisata alam. Menurut *Travel and Tourism Competitiveness Index (TTIC)*, Indonesia menduduki peringkat ke-50 dunia dan ke-4 di ASEAN tepatnya di belakang Singapura, Malaysia, dan Thailand (*Schwab dan World Economic Forum-WEF*, 2019).

Pengembangan pariwisata merupakan salah satu strategi yang digunakan oleh pemerintah dan swasta untuk mempromosikan daerah tertentu sebagai tujuan wisata guna meningkatkan perekonomian Indonesia. Pemerintah daerah dan lembaga swasta melakukan usaha pembangunan pariwisata dengan memanfaatkan lahan yang didukung daya dan dana dalam penyaluran kebutuhan pariwisata tersebut (Ristarnado dkk, 2019). Pajak pembangunan yang diterima dari pariwisata menjadi dasar pendapatan asli daerah (PAD). Oleh karena itu dalam pembangunan pariwisata telah terwujud pembangunan pariwisata berkelanjutan. Pariwisata telah menjadi salah satu industri terbesar di dunia, dan merupakan andalan utama dalam menghasilkan devisa di berbagai negara (Pitana dan Gayatri, 2005).

Desa wisata merupakan salah satu objek wisata yang sedang berkembang pada sektor pariwisata. Desa wisata biasanya dikembangkan pada kawasan pedesaan yang didalamnya masih memiliki karakteristik khusus. Karakteristik yang dimiliki pada desa wisata adalah sumber daya alam yang masih asli, keunikan desa, tradisi dan budaya masyarakat lokal. Berbagai karakteristik tersebut menjadi identitas suatu desa wisata yang memiliki kegiatan wisata minat khusus. Selain itu, desa wisata secara tidak langsung dapat mendorong masyarakat lokal untuk menjaga dan melestarikan alam serta kebudayaan yang telah dimiliki desa tersebut (Itah Masitah, 2019).

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkenal dengan sektor pariwisatanya terutama dalam keindahan pantainya yang memiliki daya tarik tersendiri. Selain keindahan pantainya pariwisata di Pulau Bangka Belitung juga menyimpan kekayaan alam dan pesona wisata budaya lokalnya, termasuk keberadaan berbagai potensi obyek dan daya tarik wisata (ODTW) yang masih perlu dikembangkan lebih serius lagi. Data di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019, tercatat kurang lebih ada 9 desa wisata yang telah dikembangkan. Kemudian, pihak pemerintah kabupaten/ kota terus didorong

untuk mengembangkan lebih lanjut potensi desa wisata yang sesuai dengan ciri khas dan karakteristik potensi masing-masing.

Selain memiliki pasir pantainya yang putih dan terumbu karang yang indah, potensi dalam laut nya juga banyak mengandung timah yang memiliki nilai jual yang tinggi. Zarina (2021) menyatakan sektor pariwisata di Bangka Belitung sudah dikenal karena laut, pantai dan gugusan pulau-pulaunya yang menawan. Pada tahun 2019 Pemerintah Provinsi Bangka Belitung berhasil meraup PAD sebesar Rp 63,5 miliar dari sektor pariwisata. Hal ini karena peningkatan jumlah kunjungan wisata yang terus meningkat sekitar 9% setiap tahun (Ferdiansyah, 2020).

Di lingkungan Pulau Besar di Desa Batu Betumpang Kecamatan Pulau Besar Kabupaten Bangka Selatan juga terdapat banyak potensi desa wisata yang belum begitu dikembangkan secara optimal. Sejauh ini sudah banyak destinasi wisata alamiah yang masih mengandalkan daya tarik alami pantainya, namun sudah bisa mengundang banyak wisatawan untuk datang. Pantai Desa Batu Betumpang memiliki mercusuar sebagai salah satu peninggalan Belanda pada Tahun 1888 dan merupakan objek wisata yang digemari oleh pengunjung saat berkunjung ke Pantai Desa Batu Betumpang yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai objek wisata pantai.

Potensi yang tinggi tersebut masih kurang didukung oleh sarana dan prasarana seperti akses jalan menuju Pantai Desa Batu Betumpang belum memadai, wc/toilet yang ada itupun dalam keadaan tidak terawat, sarana transformasi umum tidak ada, tempat peristirahatan (pendopo) ada namun dalam keadaan yang tidak terawat serta sarana dan prasarana yang lainnya masih sangat minim. Selain itu, dalam pengembangan Desa Wisata Pantai Desa Batu Betumpang perlu adanya *agenda setting* kebijakan untuk mengatur tentang pengembangannya. Hal itu di karenakan, adanya kebijakan yang mengatur hal tersebut dapat memberikan pijakan secara hukum di dalam proses pengembangan Desa Wisata Pantai Desa Batu Betumpang.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penelitian ini pada dasarnya ingin menggali secara mendalam terkait bagaimana sebenarnya *agenda setting*, khususnya dilihat dari bagaimana desain kebijakan perencanaan dan pengembangan Desa Wisata Pantai di Desa Batu Betumpang. Studi ini juga akan melakukan telaah mengenai bagaimana hambatan dan tantangan yang dihadapi pihak pemerintah, baik dalam hal ini pihak pemerintah desamaupun pihak Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.

Kajian ini kemudian lebih lanjut mengkaji tentang bagaimana dan peran antar aktor, yang dalam hal ini merupakan bagian dari *stakeholders* yang bersinggungan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam arus pengelolaan Destinasi Wisata Pantai Desa Batu Betumpang.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Maleong, 2006) Dalam proses metode pendekatan menerapkan model destinasi wisata batu betumpang akan menggunakan pendekatan partisipatoris khususnya melalui konsep *Participatory Decision Making Process*, yaitu melakukan interaksi dan komunikasi intensif dalam rangka mengelola konsensus atau gagasan bersama warga Batu Betumpang untuk mencapai program pengembangan desa wisata. Tentu gagasan ini juga berkaitan erat dalam rangka mendukung (Ambar T.Sulistiyani & Rosidah, 2003).

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian akan dilakukan oleh peneliti di Pantai Desa Batu Betumpang. Alasan peneliti ingin mengambil di wilayah Pantai Desa Batu Betumpang adalah karena ketertarikan peneliti akan kebijakan yang sedang atau sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Batu Betumpang. beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Batu Betumpang sangat erat hubungannya dengan unsur pariwisata, karenanya lokasi penelitian ini sekiranya tepat diambil oleh peneliti sebagaimana yang dituangkan didalam judul penelitian ini, ialah untuk mengali informasi yang kuat terkait desain kebijakan pengembangan terhadap Desa wisata Pantai dari sisi Desa Batu Betumpang.

Target/Subjek Penelitian

Subyek adalah orang yang mampu memberikan informasi serta gambaran tentang fakta yang terjadi dilapangan yang kemudian dapat dimintai keterangan dan selanjutnya subyek ini disebut sebagai informan. Subyek dalam penelitian ini kemudian ditujukan pada Pemerintah Desa Batu Betumpang dan Dinas Pariwisata dan olahraga Kabupaten Bangka Selatan selaku pihak yang memiliki wewenang dan pelaksana dalam menentukan kebijakan dalam urusan publik terkhusus dalam bidang pariwisata. Penelitian ini kemudian menggunakan teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sample sumber data dengan pertimbangan tertentu.

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Kemudian Susan Stainback dalam Sugiyono (2017:232).
2. Observasi merupakan salah satu metode teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Dalam pengamatan tersebut, peneliti mengamati dan mencatat secara langsung situasi yang ada dilapangan (Rahman dan Ibrahim 2009:43).
3. Dokumentasi dalam penelitian ini kemudian dijadikan sebagai data pendukung atau data sekunder. Data pendukung ini kemudian didapatkan dari foto-foto hasil observasi, wawancara, buku serta referensi lain yang dapat menjadi sumber data penunjang dalam penelitian ini.

Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data dari Miles dan Hubermas yang di kutip dari Sugiyono (2017:246) yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu:

1. Reduksi data merupakan proses memilih dan memilah data mentah yang masih beragam untuk dikelompokkan dalam pokok-pokok persoalan sesuai fokus penelitian. Tujuannya agar data yang sama segera terkelompok pada bagian yang relevan dan mudah ditelusuri bila mana diperlukan (Rahman dan Ibrahim, 2009:46).

Dalam penelitian ini, hasil data dilapangan yang didapatkan melalui proses wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik reduksi data dalam upaya mengurangi penumpukkan data secara berlebihan dan mempermudah peneliti dalam mencari data yang relevan untuk menjawab persoalan yang dirumuskan dalam rumusan masalah di penelitian yang sedang dikaji.

2. Penyajian Data ini merupakan data yang telah diolah dan disusun secara sistematis pada tahapan reduksi data, kemudian data tersebut diolah lagi dalam bentuk penyajian data. Penyajian data dapat berupa uraian singkat, bagan, grafik dan lain sebagainya. Miles dan Hubermas dalam Sugiyono (2017:249).
3. Penarikan kesimpulan merupakan tahapan dalam proses pengambilan keputusan atas pertanyaan yang telah dirumuskan dalam penelitian. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-

remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori (Sugiyono, 2017:253).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Agenda Setting* Kebijakan Perencanaan Pengembangan Pantai Desa Batu Betumpang

Agenda setting atau agenda permasalahan ini kemudian akan berlanjut pada fase-fase selanjutnya termasuk memunculkan alternatif kebijakan dan menentukan kebijakan yang diambil. Dalam setiap fase, aktor pemilik kepentingan tentu melakukan usaha-usaha untuk mempengaruhi setiap kebijakan publik yang akan disusun. Setidaknya ada tiga hal yang dilakukan oleh aktor kepentingan untuk melakukan agenda setting diantaranya: *pertama*, membangun persepsi dikalangan *stakeholders* bahwa sebuah fenomena benar-benar dianggap sebagai masalah. *Kedua*, membuat batasan masalah, dan *ketiga* memobilisasi dukungan agar masalah tersebut masuk dalam agenda pemerintah. Sehingga dari berbagai usaha yang dilakukan sebagai bagian dari agenda setting aktor-aktor yang berkepentingan mampu mempengaruhi kebijakan publik.

Dalam Kajian ini, peneliti memfokuskan pada beberapa Proses penyusunan agenda kebijakan (policy agenda) menurut Anderson, seperti di kutip Joko Widodo bahwa secara beruntun terdiri dari beberapa tahapan berikut antara lain: *private problems*, *public problems*, *issues*, *systemic* agenda dan institutional agenda yang diuraikan sebagai berikut:

a. *Privat Problems*

Penyusunan agenda kebijakan diawali dari suatu masalah yang muncul dimasyarakat, akan tetapi masalah tersebut diartikan sebagai suatu masalah pribadi atau tidak berdampak luas bagi masyarakat, masalah pribadi sendiri didefinisikan sebagai suatu masalah yang mempunyai akibat yang terbatas atau hanya menyangkut satu atau sejumlah kecil orang yang terlibat secara langsung.

Pada tahapan ini kemunculan isu hanya bersifat terbatas dan diketahui oleh beberapa orang saja. Dalam perjalanan pantai desa batu betumpang mulai muncul nya pengembangan pantai desa batu betumpaang para pemuda melihat kondisi pantai yang sangat berpotensi yang petama potensi alam dan potensi peninggalan zaman belanda kalau tidak di kembangkan pontensi itu sangat lah sia - sia maka adabeberapa pemuda mulai berpikir untuk mengembangkan pantai tersebut di bentuk lahdengan cara mengumpul para pemuda yang ada di desa batu betumpang

mengumpulkan dengan cara per rt.mengenai hal-hal yang dapat diangkat dari potensi lokal yang dimiliki pantai desa batu betumpang

b. Public Problems

Ketika masalah yang ada di masyarakat yang pada mulanya hanya sebagai privat problems terus bergulir dan melibatkan banyak orang, maka tahap selanjutnya privat problems tersebut berubah menjadi *public problems*. Public problems diartikan sebagai suatu masalah yang mempunyai akibat yang luas, termasuk akibat-akibat yang mengenai orang-orang yang terlibat secara tidak langsung. Dalam tahapan ini permasalahan yang terjadi di daerah kawasan wisata Pulau Besar Khususnya Pantai Desa Batu Betumpang telah merambat ke khalayak masyarakat luas.

c. Issues

Ketika masalah yang ada dimasyarakat menjadi public problems, maka selanjutnya masuk pada tahap issues, issues diartikan sebagai problema publik yang saling bertentangan satu sama lain, artinya sudah terdapat suatu konflik. Issues dapat pula diartikan sebagai perbedaan-perbedaan pendapat yang ada dimasyarakat tentang persepsi dan solusi terhadap suatu masalah publik.

Pada tahapan ini terjadi suatu perdebatan atau diskursus antara kelompok kepentingan dan aktor-aktor yang terlibat tentang solusi dari sebuah permasalahan. Para aktor-aktor yang terlibat dalam *issues* tersebut terdiri dari para perangkat desa seperti, Taufik, Imin, Jalaludin dengan anggota kelompok sadar wisata yaitu Adri dan Ali Akbar. Dalam hal pantai desa batu betumpang, tahapan ini berada pada saat terjadi perdebatan antar kelompok masyarakat, komunitas pengelola pantai batu betumpang dan pemerintah desa.

d. Systemic Agenda

Systemic Agenda didefinisikan sebagai semua isu yang pada umumnya dirasakan oleh para anggota masyarakat politik yang patut mendapat perhatian public dan isu tersebut memang berada dalam yurisdiksi kewenangan pemerintah. Dengan kata lain pada isu ataupun permasalahan ini pemerintah yang mempunyai kewenangan dalam hal yang berkaitan dengan kawasan wisata pantai menaruh perhatian ataupun peduli terhadap agenda-agenda kelompok sadar wisata dalam menangani permasalahan di daerah kawasan pantai Desa Batu Betumpang.

Sebagaimana dalam agenda tahunan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) mendapatkan anggaran bantuan dari pemerintah mengenai bantuan anggaran

pembibitan dan penanaman Hutan Bakau (Mangrove). Bantuan Anggaran ini ditujukan agar dapat membuat kawasan pantai dan air laut menjadi terlindungi tanpa merusak ekosistem lainnya.

e. Institutional Agenda

Institutional Agenda, didefinisikan sebagai serangkaian masalah yang secara tegas membutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang aktif dan serius dari pembuat keputusan yang sah/otoritas. Oleh sebab itu bisa disimpulkan bahwa agenda setting pada intinya berusaha untuk memunculkan masalah kepada publik sehingga publik menganggap penting terhadap suatu masalah yang sedang bergulir dimasyarakat dan dianggap sebagai suatu permasalahan yang membutuhkan tindakan kebijakan publik.

Untuk membuat suatu masalah menjadi suatu masalah publik yang kemudian berakhir pada lahirnya kebijakan publik, tentu membutuhkan agenda setting untuk membangun opini dan menggerakkan elemen - elemen masyarakat atau aktor-aktor yang berkepentingan sehingga lahir kebijakan publik sebagai mana yang diharapkan.

Pada fase ini menentukan rapat kerja yang di lakukan oleh pemerintah desa dengan kelompok sadar wisata dalam proses pengembangan pariwisata pantai desa batu betumpang. Seperti mendapatkan anggaran dalam pembangunan pantai desa batu betumpang. Para aktor tersebut sangat terpengaruh dalam proses agenda setting kebijakan pengembangan pantai tersebut.

B. Peran Aktor Dalam Implementasi Desa Wisata Pantai di Desa Batu Betumpang

Implementasi yang dikemukakan oleh Hanifah Harsono, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah suatu kebijakan dalam penyelesaian keputusan demi tercapainya tujuan yang baik dengan bergantung bagaimana implementasi yang berjalan dengan baik dalam melaksanakan proses penyempurnaan akhir.

Implementasi sesuatu kebijakan merupakan suatu proses penerapan dalam proses pengembangan berbagai proses kegiatan, dalam hal ini implementasi yang di maksud atau penerapan yang di maksud terkait dengan proses implementasi dari proses kebijakan pengembangan pantai desa batu betumpang dalam pemimplementasian proses kebijakan dalam pengembangan pantai desa batu betumpang tersebut ada beberapa aktor – aktor yang terlibat dalam proses pengembangannya aktor – aktor yang terlibat di antaranya:

1. Pemerintah Desa Batu Betumpang
2. Pokdarwis

3. Karang Taruna

4. Masyarakat

Adapun dari empat aktor yang terlibat dalam hal tersebut lebih jelas kita lihat penjelasan di bawah ini

a. Pemerintah Desa Batu Betumpang

Dalam pemplementasian proses kebijakan dalam pengembangan pantai desa batu betumpang, Pemerintah desa batu betumpang mengupayakan adanya kebijakan terkait dengan pengelolaan pantai desa batu betumpang.

b. Kelompok Sadar Wisata

Kelompok Sadar Wisata merupakan salah satu wadah organisasi kumpulan para pemuda pemudi desa batu betumpang yang membentuk kelompok dalam membangun pantai desa batu betumpang khususnya objek wisata di desa pantai batu betumpang.

Proses kebijakan yang dilakukan oleh pokdarwis tersebut dilakukan dengan berbagai cara yaitu dengan melakukan koordinasi beberapa pemerintah desa ataupun dengan kelompok pemuda lain yang ada di desa batu betumpang

c. Karang Taruna

Karang Taruna merupakan wadah pembinaan dan pengembangan serta pemberdayaan dalam upaya mengembangkan kegiatan ekonomi produktif dengan pendayagunaan semua potensi yang tersedia di lingkungan baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang telah ada. Sebagai organisasi kepemudaan, Karang Taruna berpedoman pada Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga di mana telah pula diatur tentang struktur pengurus dan masa jabatan di masing-masing wilayah mulai dari Kelurahan sampai pada tingkat Nasional.

Selain dalam kegiatan sosial, organisasi Karang Taruna Desa Batu Betumpang juga ikut andil dalam menjaga dan merawat salah satu kawasan wisata,

d. Masyarakat

Masyarakat merupakan kelompok manusia atau individu yang secara bersama-sama tinggal di suatu tempat dan saling berhubungan. Biasanya, hubungan atau interaksi ini dilakukan secara teratur atau terstruktur. Dengan adanya kelompok sosial ini, setiap individu dapat saling berinteraksi dan membantu satu sama lain. Pada dasarnya keterlibatan masyarakat sangat penting dalam

pengembangan pantai. Melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dan juga memberi ruang kepada masyarakat untuk berdagang di kawasan pantai tanpa pungutan retribusi.

C. Hambatan Yang Dihadapi Pemerintah Desa dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Batu Betumpang

Dalam proses pengembangan pantai desa batu betumpang tentu dalam proses pengembangan tersebut terdapat berbagai hambatan tantangan yang di hadapi oleh pemerintah desa ataupun kelompok sadarwisata dalam proses pengembangannya dalam hal ini proses pengembangannya tentu tidak berjalan sebagai mana kita harapan.

1. Ada kepentingan pribadi antara pemerintah desa dengan pokdarwis

Ada beberapa hambatan –hambatan ataupun tantangan yang di hadapi pemerintah desa dia antaranya adalah ada nya kepentingan antara pemerintah desa dengan kelompok sadarwisata dalam hal ini hasil temuaan ini hasil wawancara yang di lakukan peneliti bersama masyarakat desa batu betumpang oleh karena itu hal ini di perkuat oleh masyarakat bahwa ada nya perbedaan kepentingan antara pemerintah desa dengan kelompok sadarwisata dalam mengelolah pengembang pantai desa batu betumpang hal ini di perkuat oleh masyarakat desa

2. Kurang nya kesadaran terhadap kebersihan

Permasalahan sampah merupakan sebuah masalah umum yang di hadapi setiap objek wisata. Kurangnya kesadaran wisatawan dalam menjaga kebersihan lingkungan membuat lokasi objek wisata sulit terjaga kelestarian. Berbagai upaya telah di lakukan pihak pengelola mulai dari mengingatkan kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan, menyediakan tempat sampah dan sosialisasi. Adapun kesadaran dalam hal ini meliputi :

a. Kesadaran terhadap pengunjung luar desa

Kurangnya penegasan dari pihak pengelola mengenai kebersihan wisata setempat, seperti rambu-rambu informasi dan tempat sampah. Sehingga membuat pengujung luar desa kurang menyadari akan kebersihan tersebut.

b. Kesadaran terhadap masyarakat desa setempat

Minimnya rasa memiliki terhadap tempat wisata baik dalam memelihara maupun menjaga kebersihan tempat wisata tersebut.

3. Kurang nya kesadaran pemuda setempat dalam menjaga fasilitas

Ketersediaan fasilitas yang ada di tempat wisata merupakan salah satu daya tarik pengunjung dan kenyamanan wisatawan saat menikmati liburan di destinasi wisata tersebut. Apabila tidak ada pemeliharaan yang rutin akan menyebabkan percepatan kerusakan terhadap fasilitas. Diharapkan kepada pemuda baik kelompok sadarwisata untuk saling menjaga dan merawat fasilitas tersebut.

Adapun ketersediaan fasilitas yang dimaksud seperti toilet, tempat santai, akses jalan, tempat makan, tempat parkir, aturan yang jelas dan tegas, penginapan, tempat sampah dan papan informasi agar wisatawan tidak membuang sampah sembarangan, sehingga pengunjung menjadi prioritas utama agar lingkungan wisata pantai Desa Batu Betumpang terjaga kebersihan. Selain itu juga, apabila masyarakat mempunyai kesadaran tinggi terhadap lingkungan pantai dengan tidak merusak fasilitas yang disediakan

4. Kurangnya fasilitas untuk menjaga kebersihan

Pihak desa belum membuat tempat pembuangan akhir (TPA) sehingga akses pengelolaan sampah tidak ada.

5. Kurangnya petugas pengolahan kebersihan

Pihak desa tidak menyiapkan petugas kebersihan untuk mengambil sampah dari masyarakat maupun sampah dari tempat wisata sehingga terjadinya penumpukan sampah di mana-mana salah satunya di akses jalan tempat wisata.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “*Agenda Setting* Kebijakan Pengembangan Destinasi Desa Batu Betumpang (Studi terhadap Pembangunan Desa Batu Betumpang sebagai Wisata Baru di Bangka Selatan)” yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya menggunakan analisis *Agenda Setting* oleh Anderson, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *Agenda setting* merupakan tahap awal dalam proses pembuatan kebijakan publik. Penyusunan agenda akan membahas mengenai sebab-sebab kemunculan masalah hingga menjadi fokus perhatian dalam agenda kebijakan publik.

Adapun fase-fase perkembangannya sebagaimana teori *agenda setting* dari Anderson adalah sebagai berikut:

1. *Private Problems*, Pada tahapan ini kemunculan isu hanya bersifat terbatas dan diketahui oleh beberapa orang saja. Dalam perjalanan pantai desa batu betumpang mulai munculnya pengembangan pantai desa batu betumpang para pemuda melihat kondisi

pantai yang sangat berpotensi yang pertama potensi alam dan potensi peninggalan zaman belanda kalau tidak di kembangkan pontensi itu sangatlah sia - sia maka ada beberapa pemuda mulai berpikir untuk mengembangkan pantai tersebut di bentuk dengan cara mengumpul para pemuda yang ada di desa batu betumpang

2. *Public Problems*, Dalam tahapan ini permasalahan yang terjadi di daerah kawasan wisata Pulau Besar Khususnya Pantai Desa Batu Betumpang telah merambat ke khalayak masyarakat luas. Dalam penelitian ini permasalahan yang harus ditindak lanjuti mengenai keindahan kawasan wisataya itu lebeih menata rapi warung-warung kecil dan lebih menempatkan warung-warung tersebut ditempat yang khusus agar keindahan wisata tidak terganggu dengan hal tersebut serta tempat-tempat gazebo sudah sangat rusak akibat para oknum-oknum remaja yang nakal yang menagibatkankeresahan para warga yang berkunjung kewisata tersebut.
3. *Issues*, Pada tahapan ini terjadi suatu perdebatan atau diskursus antara kelompok kepentingan dan aktor-aktor yang terlibat tentang solusi dari sebuah permasalahan. Dalam hal pantai Desa Batu Betumpang, tahapan ini berada pada saat terjadi perdebatan antar kelompok masyarakat, komunitas pengelola pantai Batu Betumpang dan pemerintah desa.. Terjadi perbedaan pandangan tentang pengelolaan dan pengembangan kawasan pantaidesabatubetumpang.
4. *Systemic Agenda*, Dengan kata lain pada isu ataupun permasalahan ini pemerintah yang mempunyai kewenangan dalam hal yang berkaitan dengan kawasan wisata pantai menaruh perhatian ataupun peduli terhadap agenda-agenda kelompok sadar wisata dalam menangani permasalahan di daerah kawasan pantai Desa Batu Betumpang. Sebagaimana dalam agenda tahunan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) mendapatkan anggaran bantuan dari pemerintah mengenai bantuan anggaran pembibitan dan penanaman Hutan Bakau (Mangrove). Bantuan Anggaran ini ditujukan agar dapat membuat kawasan pantai dan air laut menjadi terlindungi tanpa merusak ekosistem lainnya.
5. *Institutional agenda*, didefinisikan sebagai serangkaian masalah yang secara tegas membutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang aktif dan serius dari pembuat keputusan yang sah/otoritas. Oleh sebab itu bisa disimpulkan bahwa agenda setting pada intinya berusaha untuk memunculkan masalah kepada publik sehingga publik menganggap penting terhadap suatu masalah yang sedang bergulir dimasyarakat dan dianggap sebagai suatu permasalahan yang membutuhkan tindakan kebijakan publik.

Seiring proses berjalannya pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata Pulau Besar yaitu Pantai Desa Batu Betumpang ditemukan beberapa hambatan dan tantangan yang dapat diam bila untuk kedepannya. Hambatan dan tantangan ini juga berdasarkan realitas yang terjadi di wilayah Pulau Besar khususnya desa Batu Betumpang saat ini. Dalam hal hambatan: ada beberapa hambatan-hambatan ataupun tantangan yang di hadapi pemerintah desa diantaranya adalah ada nya kepentingan antara pemerintah desa dengan kelompok sadar wisata dalam hal ini hasil temuan ini hasil wawancara yang di lakukan peneliti bersama masyarakat desa batu betumpang oleh karena itu hal ini di perkuat oleh masyarakat bahwa ada nya perbedaan kepentingan antara pemerintah desa dengan kelompok sadar wisata dalam mengelolah pengembang pantai desa batu betumpang.

Selain itu juga, hambatan terhadap pembangunan kawasan wisata pantai tersebut yaitu Kesadaran terhadap kebersihan, Permasalahan sampah merupakan sebuah masalah umum yang di hadapi setiap objek wisata. Kurangnya kesadaran wisatawan dalam menjaga kebersihan lingkungan membuat lokasi objek wisatasulit terjaga kelestarian. Berbagai upaya telah di lakukan pihak pengelola mulai dari mengingatkan kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan, menyediakan tempat sampah dan sosialisasi.

Saran

Terkait dengan pengembangan kawasan pariwisata pantai di Desa Batu Betumpang membutuhkan regulasi yang mengintegrasikan kawasan wisata terpadu secara keseluruhan sehingga tercipta komitmen bersama, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Dari pernyataan-pernyataan komunitas lokal pengelola kawasan wisata pantai diharapkan adanya pelibatan secara masif dan substantif dalam hal perencanaan kawasan terpadu pantai desa batu betumpang.

Selain itu, proses pengembangannya juga membutuhkan koordinasi yang jelas antar pemerintah dan masyarakat dengan pelibatan secara langsung. Inovasi-inovasi baru dalam menjalankan konsep ekosisten pembangunan berkelanjutan sangat diperlukan untuk mempertahankan status kawasan pantai terpadu yang sudah didapatkan. Hal ini harus mulai diubah dari mulai minsething implementasi di lapangan. Konsistensi dalam menjaga alam dan memanfaatkannya sebagai pemenuhan kebutuhan tetap harus mengusung prinsip berkelanjutan agar tidak terjadi ancaman-ancaman serius dari sektor ekologis.

TENTANG PENULIS

Nama : Robby
Tempat Tanggal Lahir : Batu Betumpang 27 Januari 1999
Alamat : Jl.Desa Batu Betumpang, Gg.pondok Pasentren Darul Hikmah,
Kel.Batu Betumpang, Kecamatan Pulau Besar, Kabupaten Bangka
Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat Domisili : Jl. Kacang pedang, Gg. Merak, Kel. Kacang Pedang, Kecamatan Rangkui,
Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
No. HP : 082371614243
Agama : Islam
Golongan Darah : A
Status : Belum Menikah
Email : robbyokey60@gmail.com
Instagram : robby_27_
Hobi : jogging

DAFTAR PUSTAKA

- Ahima-Putra, dkk, 2002, Potensi dan prospek pengembangan Desa Wisata diDKIYogyakarta.MakalahdalamPembinaanbagiPengelolaObyekWisata se DarIY, diselenggarakanDinasPariwisata Yogyakarta
- Ambar T. dkk, 2003, *ManajemenSumberDayaManusia, GrahaIlmu, Yogyakarta.Development Approach, New YorkVanNonStrandReinhold*[Http://www.kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=16&i d=1413](http://www.kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=16&i d=1413)Rata-rata Pengeluaranwisatawan
- Anderson, J. E, 2003. *Public Policymaking: An Introduction*. Boston: Houghton
- Dye, Thomas R. 1995 *Understanding Public Policy*. New
- Hetifah, S.J. 2003. *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance: 20 Prakarsa InovatifdanPartisipatif di Indonesia*. Jakarta: YayasanObor Indonesia.
- Inskeep, Edward, 1991, *Tourism Planning and Integrated and Sustainable*
- Iskandar, J. (2012). *KapitaSelektateoriAdministrasi Negara. Idaarah: JurnalManajemenPendidikan, 1(2), 1-10*. Jersey: Prentice Hall.
- Karlina, Bella. 2015.*Pengaruh Manajemen Fasilitas Terhadap Mutu Layanan Diklat Di pusat pengembangan dan pemberdayaan dan Pendidikan dan Tenaga*

Kependidikan Bidang Mesin dan Teknik Industri (PPPPTK BMTI) Bandung. Universitas Pendidikan Indonesia. Kebijakan (terjemahan). Jakarta: Kencana. Mancanegara perkunjungan, diunduh tgl 11 september 2016,10.30

- Kotler, Philip, Donald H. Haiderdan Irving Rein.1993.*Marketing Places: Attracting Investment, Industry, and Tourism to Cities, States, and Nations. New York: The Free Press*
- Moleong, Lexy J, 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja
- Parson, Wayne. 2005. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Patijaya, B., & Lusa, s. (2019) Strategipariwisataberkelanjutan Bangka Belitung*
- Pitana, I Gede, 2002. *Pidato Pengukuhan Guuru Besar Tetap Dalam Bidang Sosial Pariwisata Pada Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian Universitas Udayanan.*
- Puspita, Ratih Indah , 2016. *Analisis Penyusunan Agenda Kebijakan Publik:*
- Rahman, Bustamidan Ibrahim, 2009. *Menyusun Proposal Penelitian, UBB Press, Pangkalpinang*
- Ramadana CB, Ribawanto H. *PP No 72/2005. (Adm Publik. 2010;1(6):1068-1076). Rosdakarya, Bandung*
- Soekadijo. 2001. *Manajemen Kepariwisata, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka. Studi Kajian Agenda Penyusunan Kebijakan Penyelesaian Pelanggaran RtRw oleh INDUSTRI CV. EVERGREEN INDOGARMENT*
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian, Alfabeta, Bandung*
- Zarina, Berlian. 2021, *Antara Pariwisata dan Pertambangan: Kontestasi Tata ruang di Pantai Tanjung Putat dan Pantai Lepar Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka*
- Internet <https://bangka.tribunnews.com/2017/11/06/jadikan-batu-betumpang-daerah-wisata-usaha-masyarakat-dan-adat-jadi-pendukung>.